

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Pengertian bank menurut Dendawijaya (2009:14). Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Hal ini biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.

Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat yang biasanya dikenal dengan nama kredit. Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Kredit merupakan “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 :114).

Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko uang tidak kembali, dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan niat baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Colateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian).

Kredit semakin berkembang pada saat ini dalam kalangan masyarakat, tidak hanya dikalangan masyarakat kecil maupun menengah, namun perusahaan besar pun melakukan kegiatan kredit, sehingga semakin banyak dan meningkatnya pelayanan kredit yang ada di Indonesia, baik dari perusahaan perbankan maupun perusahaan non perbankan.

Salah satu bank di Indonesia yang ikut serta memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu bank daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah. Ijin usaha dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 November 1963, peresmian dilakukan pada tanggal 15 April 1964. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan ijin usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai surat No. S-841/MK.071/1993 tanggal 18 Agustus 1993.

Pada tahun 1999 berdasarkan Perda No. 1 tanggal 2 Februari 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan *call name* Bank Kalbar melalui Akta Notaris Widiyansyah, SH No. 81 tanggal 23 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 No. C2-8229 HT.01.01 tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999. Tanggal 7 Mei 1999, Bank Kalbar mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 30 Juli 2004, Bank Kalbar menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh

wilayah Kalimantan Barat dan juga di Jakarta Pusat diantaranya 1 kantor pusat, 19 kantor cabang, 52 kantor cabang pembantu, 1 unit usaha mikro, 49 kantor kas, 15 kas mobil, 1 kas terapung, 34 *payment point*, 48 layanan syariah, dan 135 mesin ATM.

Salah satu cabang yang dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Bank Kalbar Cabang Flamboyan. Seiring perjalanannya, perkembangan Bank Kalbar Cabang Flamboyan sangat dipengaruhi oleh adanya penyaluran kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut disajikan mengenai perkembangan dalam penyaluran kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara umum kepada masyarakat dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.1

Data Penyaluran Kredit

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Kredit	Pertumbuhan
1	2010	Rp 3.944.684	-
2	2011	Rp 4.505.435	14,21%
3	2012	Rp 5.571.448	23,66%
4	2013	Rp 6.499.649	16,66%

Sumber: www.bankkalbar.co.id

Dilihat pada data di atas bahwa dikatakan proses penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dalam hitungan nominal jutaan rupiah, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 3.944.684 ke tahun 2011 sebesar Rp. 4.505.435, penyaluran kredit mengalami pertumbuhan sebesar

14,21%. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.505.435 menuju pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.571.448, mengalami pertumbuhan 23,66%. Kemudian untuk tahun 2012 sebesar Rp. 5.571.448 ke tahun 2013 sebesar Rp. 6.499.649, sebesar 16,66%.

Perkembangan perkreditan di atas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor permintaan dan kebijakan pemerintah. Permintaan kredit umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan investasi dan kebutuhan konsumsi pribadi. Kebijakan kredit, seperti penetapan suku bunga, dapat mempengaruhi permintaan kredit. Artinya, ada suatu keterkaitan timbal-balik antara permintaan kredit dengan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah, melalui Bank Indonesia, menetapkan suku bunga naik, maka seluruh bank pemerintah maupun bank swasta akan cenderung menaikkan suku bunga kredit. Akibatnya, permintaan kredit akan cenderung turun, karena nasabah pribadi, seperti pengusaha kecil tidak akan mampu membayar cicilan kredit yang besar. Dengan adanya faktor-faktor yang disebutkan di atas, maka bagi setiap perbankan yang melakukan kegiatan perkreditan untuk mengembangkan tingkat keandalan pengendalian internal dalam setiap perusahaannya agar proses kredit tersebut berjalan dengan efektif dan efisien baik bagi masyarakat maupun bagi personel bagian perkreditan tersebut.

Tingkat pengendalian internal atau yang biasa disebut dengan sistem pengendalian internal dalam setiap perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu.

Menurut Siti dan Ely (2010:312) "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam

suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan mengenai keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan efektivitas dan efisiensi operasi”

Sedangkan menurut Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011:137) “Pengendalian Intern adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini , yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Ciri-ciri pokok sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tepat, suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk

melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang, pendapatan, dan biaya, serta praktek yang sehat yang harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi disetiap bagian dalam organisasi, dan suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya.

Agar pengelolaan bisnis perbankan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi kaidah pengelolaan perbankan yang berlaku, maka disamping harus memiliki sumber daya keuangan, sistem dan prosedur yang dapat diandalkan dan kuat, bisnis perbankan harus didukung oleh tersedianya personel yang kompeten dan profesional dalam pengelolaannya. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

Lingkungan pengendalian yang efektif dalam setiap perusahaan khususnya dalam kegiatan menyalurkan kredit ke masyarakat dapat dilihat dari peranan personel pelaksana kredit tersebut. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap personel pelaksana prosedur penyaluran kredit haruslah sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI meliputi bagian kerja personel pelaksana kredit yang meliputi mengidentifikasi potensi nasabah kredit, menawarkan produk kredit kepada nasabah, melakukan penilaian atas permohonan kredit non retail, melakukan penilaian atas permohonan kredit retail, mengusulkan keputusan kredit, melakukan perikatan perkreditan, mengusulkan pencairan kredit, memelihara nasabah kredit, mengidentifikasi permasalahan nasabah kredit bermasalah, dan melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit, serta memberikan peningkatan pelayanan nasabah, hal ini dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien.

Kompetensi personel bagian perkreditan yang baik dalam setiap perusahaan mencakup kelompok kredit perbankan yang mempunyai kegiatan untuk memperoleh layanan jasa kredit perbankan yang prosesnya dimulai dari kebijakan umum pemberian kredit, jenis produk kredit, sistem dan prosedur pengajuan permintaan kredit, proses evaluasi dan persetujuan kredit, pencairan dan pengendalian kredit hingga pemecahan masalah kredit macet. Kemampuan kerja yang dimiliki oleh personel pelaksana penyaluran kredit mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Standar Kompetensi Personel Bagian Perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan”.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh setiap perbankan yang diterapkan sebagai salah satu pengendalian internal perusahaan, maka pentingnya untuk diketahui mengenai adanya peranan dari personel pelaksana bagian perkreditan yang menjalankan prosedur kredit dengan baik dan tepat. Dari hal di atas, penulis dapat memaparkan beberapa permasalahan yang perlu diketahui jawabannya yaitu:

1. Bagaimana tingkat keandalan pengendalian internal dalam proses perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan ?
2. Bagaimana kompetensi kerja yang dimiliki oleh personel pelaksana bagian perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mendukung penerapan pengendalian internal ?

1.3. Batasan Penelitian

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal dalam standar kompetensi personel bagian perkreditan mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga pada penelitian ini, penulis memusatkan fokus penelitian hanya kepada memaparkan tentang keandalan penerapan pengendalian internal dalam proses perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan dan kesesuaian kompetensi kerja yang dimiliki oleh personel pelaksana penyaluran kredit PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan dengan

standar kompetensi kerja yang diterapkan SKKNI untuk menunjang pengendalian internal agar bekerja dengan efektif dan efisien.

1.4. Tujuan Penelitian

Pentingnya tingkat keandalan pengendalian internal dalam penyaluran kredit yang didukung oleh standar kompetensi kerja yang baik bagi personel pelaksana kredit, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat keandalan pengendalian internal dalam proses perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan.
2. Menjelaskan kompetensi kerja yang dimiliki oleh personel pelaksana bagian perkreditan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mendukung penerapan pengendalian internal.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis terutama ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal dan standar kompetensi personel bagian perkreditan.

2. Manfaat bagi perusahaan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan terkait sebagai bahan masukan mengenai pengakuan tingkat keandalan pengendalian internal yang diterapkan serta kesesuaian standar kompetensi kerja yang dimiliki oleh personel pelaksana kredit yang menjalankan proses pemberian kredit dengan SKKNI.

3. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti-peneliti di masa datang untuk membahas mengenai sistem pengendalian internal dalam standar kompetensi personel bagian perkreditan.